



**KETUA**  
Dunia yang  
Setara  
Bagi Semua

**KORPOLKAM**  
DPR dan Pemerintah  
Sinergikan Rekonstruksi  
Anggaran, Demi Efisiensi dan  
Kepentingan Publik

# Pemda Diajak Sukseskan MBG



# Pemda Diajak Sukseskan MBG



FOTO: JK/AHA

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memantau program Makan Bergizi Gratis di SMAN 2 Pangkal Pinang, Kamis (13/2).

**K**etua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Pemerintah Daerah Provinsi Babel bekerjasama dengan UMKM di sekolah-sekolah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jangan sampai, karena program ini geliat UMKM yang selama ini sudah eksis disekolah justru mati karena adanya program tersebut.

“Tolong upayakan pak kepala sekolah, yang sekarang sudah ada kantinnya. Kalau bisa kantin itu bagian integrasi dari program ini. Kita negosiasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetap mereka yang mengadakan tapi lokusnya bisa per sekolah,” kata Rifqinizamy saat memantau program Makan Bergizi Gratis di SMAN 2 Pangkal Pinang di Provinsi Babel, Kamis (13/2).

Menurut Politisi Fraksi Partai Nasdem ini, di sejumlah daerah sudah banyak keluhan terhadap program MBG ini yang justru mematikan geliat ekonomi dari

**Tolong upayakan pak kepala sekolah, yang sekarang sudah ada kantinnya. Kalau bisa kantin itu bagian integrasi dari program ini. Kita negosiasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetap mereka yang mengadakan tapi lokusnya bisa per sekolah.**

para UMKM yang sudah eksisting disekolah-sekolah. “Kami mendapatkan masukan di beberapa tempat, kalau (Program MBG) ini dilaksanakan siang hari efeknya anak-anak mengurangi belanjanya ke kantin. Dan itu menurut kami juga akan sangat serius kalau kemudian tidak kita mitigasi dari sekarang,” pungkas Rifqi.

Legislator Dapil Kalsel I ini juga mengapresiasi Pemda Babel yang telah melaksanakan program MBG ini, walaupun dari sisi teknis pelaksanaan masih dalam tahap persiapan yang terus dilakukan exercise oleh pemerintah pusat. Namun, menurutnya, Provinsi Babel berani mengambil inisiasi, setidaknya di sekolah SMAN 2 Pangkal Pinan dan sudah terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bangka Belitung. **jk/rdn**





# Dunia yang Setara Bagi Semua



Ketua DPR Puan Maharani dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 forum parlemen negara-negara di Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) yang digelar di Baku, Azerbaijan. Rabu (19/2/2025) pagi waktu setempat.

FOTO: IST/PDT

**K**etua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya kesetaraan global dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Baku, Azerbaijan. Mengusung tema “Peran Diplomasi Parlemen dalam Memperkuat Kerja Sama Multilateral di Asia,” Puan menyoroti era ketidakpastian yang dihadapi dunia, seperti persaingan kekuatan besar, konflik, dan perubahan iklim.

Ia menekankan pentingnya multipolaritas untuk mencegah dominasi satu kekuatan, seraya menyerukan multilateralisme berbasis hukum internasional demi kolaborasi global yang adil. “Kita harus menghindari tindakan sepihak dan memajukan kepentingan nasional tanpa mengorbankan negara lain,” ujar Puan.

Puan juga menyoroti

**Kita harus menghindari tindakan sepihak dan memajukan kepentingan nasional tanpa mengorbankan negara lain.**

peran penting diplomasi parlemen dalam menciptakan perdamaian, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. Mengenai Palestina, ia meminta parlemen Asia mendukung gencatan senjata di Gaza, memastikan bantuan kemanusiaan, dan menolak relokasi warga Palestina.

Dengan kerja sama yang erat, Puan berharap Asia dapat bangkit dari ketidakpastian menuju dunia yang stabil, damai, dan setara bagi semua. **aha**



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**  
Suprihartini S.I.P., M.Si. (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si., (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom., M.A. (Kasubag Analisis Media)  
Wiryawan Narendro Putro, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Baniyah, Prima Danutirto, A.Md.,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom.,  
Blanca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom.,  
Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom.,  
Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Fauzral, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah,  
S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat  
Eko Budi Setianto, Tauran Syahrullu, Purnito Pranowo, Singeh Kinanti  
Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha  
Frista Dysie, Ballys Maeshyntia,  
Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien,  
Yasmin Nabila

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,  
R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Alfidillah, Gerald Opie,  
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,  
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Wawan

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Insan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom.

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E.,  
Indah Ekawati, S.I.Kom.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)  
Adi Ardiansyah, M.M.

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrissa Dwipa

Telp. 021-571 5697  
Email: bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# DPR dan Pemerintah Sinergikan Rekonstruksi Anggaran

**D**alam upaya memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara serta menghindari informasi yang simpang siur di masyarakat, Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rekonstruksi dan relokasi anggaran.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2) usai rapat menyampaikan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk memperjelas penyusunan ulang anggaran, termasuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

"Hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi persepsi yang keliru," ujar Dasco.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa langkah rekonstruksi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tetap berjalan tanpa pemotongan. Untuk tahun anggaran 2025,

program ini akan diberikan kepada 1.040.192 mahasiswa dengan total anggaran sebesar Rp14,7 triliun. Begitu pula dengan beasiswa lain seperti LPDP dan Beasiswa Indonesia Bangkit yang tetap berlanjut sesuai kontrak yang sudah berjalan.

**DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta memastikan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak menghambat layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.**

Selain itu, tunjangan kinerja dosen yang selama ini menjadi perhatian juga sedang dalam tahap finalisasi. Tunjangan ini akan diberikan kepada 97.734 dosen di berbagai kategori, termasuk dosen di PTN BLU dan PTN Satker yang belum mendapatkan remunerasi.

DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta memastikan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak menghambat layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. — **ssb/aha**

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

FOTO: ENO/PDT



# Fondasi Kokoh Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen

**D**engan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) menambah panjang daftar gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di sekitar 100 hari pemerintahannya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Adies Kadir menilai kebijakan yang diumumkan pada 17 Februari 2025 tersebut akan menjadi 'game changer' dalam outlook ekonomi Indonesia tahun ini hingga beberapa tahun ke depan.

Diketahui, belum lama ini,

masyarakat dikejutkan dengan cepatnya proses aksesi pada blok ekonomi negara-negara berkembang BRICS, di mana Indonesia telah resmi diterima sebagai anggota penuh per 1 Januari 2025. Kemudian, Presiden Prabowo melakukan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang nilainya mencapai Rp 308 triliun. Hasil dari penghematan tersebut direalokasikan untuk pendirian sebuah lembaga pengelola investasi yang juga mengejutkan publik, yaitu Dana Anagata Nusantara atau Danantara.

"Dibanding gebrakan-gebrakan Presiden Prabowo yang lain, kebijakan DHE SDA termasuk

yang paling ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar. Karena, kebijakan DHE SDA memiliki dampak yang signifikan baik dari sisi fiskal, moneter, maupun perekonomian secara umum. Kebijakan ini merupakan terobosan yang sangat strategis dan krusial dalam mewujudkan visi dan misi ekonomi yang dijanjikan Presiden sejak kampanye pada pemilu tahun lalu," jelas Adies dalam keterangan tertulis yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (21/2).

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaannya, penempatan DHE SDA masih berada di kisaran 37 persen sampai 42 persen pada tahun 2024. Dengan kebijakan yang terbaru, jangka waktu penempatan DHE SDA di perbankan dalam negeri diperpanjang menjadi 12 bulan. Porsi penempatannya pun juga ditingkatkan dari 30 persen menjadi 100 persen.

"Dengan cadangan devisa sebesar itu, otoritas maupun moneter punya ruang gerak yang leluasa,"

fiskal memiliki  
atannya  
— rdn

Wakil Ketua DPR RI  
Koordinator Ekonomi  
dan Keuangan  
(Korekku) Adies Kadir.



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Generasi Muda Harus Dekat dengan Legislatif



FOTO: MIN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, saat mengisi acara DPR Connect di Ruang Abdul Muis, Nusantara I, DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

**W**akil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses legislatif guna menciptakan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam acara DPR *Connect* bertajuk “DPR dan Generasi Muda: Kolaborasi untuk Perubahan”, yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Nusantara I, DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).

Politisi Fraksi PKB ini menyoroti pentingnya kanal aspirasi seperti Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang dapat dimanfaatkan generasi muda untuk menyampaikan pandangan mereka. Selain itu, ia

mendorong agar mereka lebih aktif dalam menyampaikan masukan melalui para wakil rakyat saat reses.

Acara DPR *Connect* yang digelar bekerja sama dengan Kompas ini menjadi ruang diskusi yang penuh energi dan inspirasi. Cucun menyampaikan apresiasi

**Bangga bisa membuka acara DPR CONNECT, ruang kolaborasi antara DPR dan generasi muda untuk membangun perubahan bersama.**

kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam dialog ini.

“Bangga bisa membuka acara DPR *CONNECT*, ruang kolaborasi antara DPR dan generasi muda untuk membangun perubahan bersama. Diskusi yang penuh energi dan inspirasi ini membuktikan bahwa suara anak muda adalah kekuatan besar untuk masa depan,” ucapnya.

Di akhir acara, Cucun mengajak generasi muda untuk terus bersemangat dalam menyuarakan aspirasi demi membangun masa depan yang lebih baik. “Semangat anak muda dalam menyuarakan aspirasi adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mari terus bergerak bersama untuk perubahan yang nyata!” pungkasnya. **we/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Komisi I Terima Kunjungan Parlemen Inggris



FOTO: MUN/PDT

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, usai menerima kunjungan resmi dari delegasi Parlemen Inggris yang dipimpin oleh Anggota Parlemen (MP) Partai Buruh untuk Liverpool Riverside Kim Johnson, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

**K**omisi I DPR RI, yang dipimpin oleh Ketua Utut Adianto, menerima kunjungan resmi dari delegasi Parlemen Inggris yang dipimpin oleh Anggota Parlemen (MP) Partai Buruh untuk Liverpool Riverside Kim Johnson. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh makna tersebut, Utut menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Inggris yang sudah terjalin baik, dengan fokus pada peningkatan sektor perdagangan.

Utut menyatakan, meskipun Indonesia dan Inggris sudah memiliki hubungan dagang yang positif dengan surplus mencapai 800 juta dolar, potensi hubungan

kedua negara masih sangat besar. “Kita memang *surplus* 800 juta dolar, hemat saya, saya katakan kepada mereka, kita bisa bahkan membuatnya lebih baik dari sekarang,” ujar Utut dalam usai pertemuan yang berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (17/2).

Selain perdagangan, Utut menjelaskan bahwa pertemuan ini juga mencakup diskusi mengenai sejumlah isu global yang tengah menjadi perhatian dunia, seperti konflik Gaza, Palestina, dan Iran. Ia juga menyoroti dampak negatif kemajuan teknologi, seperti fenomena judi online yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Parlemen (MP) Partai Buruh untuk Liverpool Riverside Kim Marie Johnson yang memimpin kunjungan delegasi Parlemen Inggris tersebut mengungkapkan pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dengan pihak Kerajaan dan Perdana Menteri Inggris pada November 2024 sebagai momentum penting dalam mempererat hubungan kedua negara.

“Pemerintah Inggris berjanji untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan hubungan yang lebih kuat, termasuk dalam hal pengembangan ekonomi dan organisasi internasional seperti OECD,” pungkasnya.

 pun/aha



# Selesaikan Sengketa Tanah Secara Tuntas, Tidak Dicicil!

**A**nggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak Kementerian ATR/BPN mendesain penyelesaian sengketa tanah secara holistik tidak cicilan. Tak sekadar berbasis penyelesaian prosedur-birokratis, namun substansial hingga tuntas.

Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Pekanbaru, Provinsi Riau bersama Pj Gubernur, Kepala Daerah, Pejabat Kementerian ATR/BPN, & Jajaran Kanwil, Serta Kantah BPN se Riau, Rabu (19/2). “Persoalan penyelesaian sengketa tanah di masyarakat berlarut-larut disebabkan penyelesaian berdasar prosedural administratif yang jadi pedoman ATR/BPN,” kata pria yang kerap disapa Gus Khozin itu kepada **Parlementaria**.

Anggota DPR Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini mencontohkan konflik pertanahan yang terjadi di Kampar, Riau antara PT Sekar Bumi Alam Lestari (SBAL) dengan warga yang berlangsung lama. Begitu juga

**Pendekatannya harus diubah, tak sekadar pemenuhan aspek formilnya yang prosedural-administratif, tetapi yang utama aspek materiilnya harus dituntaskan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.**

laporan yang ia terima di Pekanbaru, dan beberapa daerah di Provinsi Riau lainnya, yang berlarut-larut.

Menurut dia, ketidakpastian dalam penyelesaian konflik tanah akan berdampak pada aspek sosial, politik dan ekonomi. “Penyelesaian konflik pertanahan itu tak sekadar formil, tetapi yang utama adalah materiilnya. Tak sekadar jawaban dari BPN sudah ditangani, tetapi pokok perkaranya masih bermasalah,” tegas Khozin.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khozini, Jember ini mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mengubah pola pendekatan dalam penyelesaian konflik agraria di masyarakat. “Pendekatannya harus diubah, tak sekadar pemenuhan aspek formilnya yang prosedural-administratif, tetapi yang utama aspek materiilnya harus dituntaskan agar masyarakat mendapat kepastian hukum,” tandas Khozin. — **rdn**

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik di Pekanbaru, Provinsi Riau bersama Pj Gubernur, Kepala Daerah, Pejabat Kementerian ATR/BPN, & Jajaran Kanwil, Serta Kantah BPN se Riau, Rabu (19/2/2025).



FOTO: RDN/PDT





Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, saat konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

# Evaluasi DKPP, Pengusutan Pelanggaran Pemilu Harus Objektif

**K**omisi II DPR RI melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI guna meningkatkan efektivitas lembaga tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, mengungkapkan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari tugas DPR dalam mengawasi mitra kerjanya.

“Salah satu fungsi kami adalah mengevaluasi seluruh mitra kerja kami di Komisi II DPR, salah satunya DKPP. Kemarin sudah kami lakukan rapat tertutup. Dan hari ini kami coba

menjelaskan isi evaluasi tersebut, yang intinya agar kinerja DKPP lebih ditingkatkan,” ujar Bahtra dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Bahtra menjelaskan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari daerah terkait kasus dan laporan yang belum ditindaklanjuti oleh DKPP, baik yang berkaitan dengan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan legislatif (Pileg). Ia juga menyoroti adanya kasus lama yang sudah disidangkan tetapi kembali dibawa

ke persidangan, yang menurutnya dapat memicu polemik di daerah.

Ia menekankan pentingnya independensi DKPP agar terbebas dari intervensi politik. “Keputusan DKPP tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik mana pun. DKPP harus mengambil keputusan seobjektif mungkin,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, Dede Yusuf, menambahkan bahwa DKPP harus bekerja dengan batas waktu yang jelas untuk menghindari munculnya gugatan baru. Ia juga menyoroti adanya dugaan tebang pilih dalam penanganan kasus. “Banyak laporan ke DKPP yang tidak diteruskan ke persidangan, sementara ada juga yang langsung diproses. Sehingga muncul dugaan adanya tebang pilih terhadap kasus tertentu atau adanya titipan dari pihak eksternal,” ujar Dede. **ayu/aha**

**Salah satu fungsi kami adalah mengevaluasi seluruh mitra kerja kami di Komisi II DPR, salah satunya DKPP. Kemarin sudah kami lakukan rapat tertutup. Dan hari ini kami coba menjelaskan isi evaluasi tersebut, yang intinya agar kinerja DKPP lebih ditingkatkan.**



# PN Jakarta Pusat Diminta Tunda Eksekusi Lahan Kampus UPI YAI

**K**omisi III DPR RI menerima aspirasi dari PT Indosari Murni terkait eksekusi lahan Universitas Persada Indonesia (UPI). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat dan kuasa hukum PT Indosari Murni, Komisi III meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda dan melakukan evaluasi permohonan eksekusi pengosongan lahan pada kampus UPI YAI tersebut.

Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, saat menerima aspirasi dari PT Indosari Murni terkait eksekusi lahan Universitas Persada Indonesia (UPI), di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Adapun, penundaan dan evaluasi permohonan eksekusi pengosongan lahan dilakukan

**Jadi kita akan tidak lanjut dengan mediasi ya nanti kita mediasikan mungkin kalau ada temen-temen yang pengen ikut komunikasi nggak papa nanti dengan saya.**

dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan bagi ribuan mahasiswa dan dosen. Kemudian, Komisi III juga meminta kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya serta Kapolres Metro Jakarta Pusat untuk tidak turut serta dalam proses eksekusi tersebut.

Komisi III selanjutnya akan melakukan tindak lanjut kasus tersebut dengan melakukan mediasi antara pihak-pihak terkait yang bersengketa untuk mencari solusi bersama. "Jadi kita akan tidak lanjut dengan mediasi," kata Habiburokhman, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Sebagai informasi, berdasarkan perkara PN Jakpus No. 58/Pdt/Eks-RL/2024/PN Jkt.Pst, eksekusi pengosongan lahan Universitas Persada Indonesia YAI direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025 mendatang.

— **bia/rdn**



FOTO: DEP/PDT



# Awasi Impor Ilegal Kebutuhan Bahan Pokok Jelang Ramadan

**A**nggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengingatkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan perhatian penuh terhadap peredaran barang-barang impor, terutama yang rawan masuk secara ilegal. Peralnya, menjelang bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok, seperti bawang merah, bawang putih, gula, kacang, dan produk sandang seperti tekstil, diperkirakan akan meningkat.

“Pihak berwenang agar lebih berhati-hati melihat impor barang-barang kebutuhan pokok mana saja yang tidak terkontrol, (karena) dapat menimbulkan masalah serius bagi perekonomian lokal dan negara,” tegasnya kepada **Parlementaria** usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto beserta Jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat (21/2).

Politisi Fraksi Golkar ini menjelaskan banyak barang impor

yang seharusnya masuk melalui jalur resmi, tetapi ada dugaan kuat bahwa sejumlah barang tersebut berasal dari impor ilegal. Hal ini, selain merugikan pelaku usaha lokal, juga mengurangi penerimaan negara yang seharusnya didapatkan dari

**Penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal sangat penting, mengingat dampak buruknya terhadap perekonomian, terutama bagi para petani dan pengusaha lokal yang terkena dampak persaingan tidak sehat.**

proses impor yang sah.

“Dengan demikian saya harapkan, pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Bea Cukai bisa memperketat pengawasan terhadap jalur-jalur impor, terutama yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri. Penegakan hukum yang tegas terhadap impor ilegal sangat penting, mengingat dampak buruknya terhadap perekonomian, terutama bagi para petani dan pengusaha lokal yang terkena dampak persaingan tidak sehat,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, transparansi dalam penegakan hukum juga diharapkan, agar rakyat dapat merasakan perlindungan dari negara. Karena itu, ia menekankan penegak hukum harus memiliki rasa cinta yang besar terhadap bangsa dan negara serta kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan praktik impor ilegal dapat ditekan, sehingga perekonomian lokal tetap terjaga dan penerimaan negara dari sektor ini dapat meningkat,” pungkasnya.

— rni/rdn

**Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto beserta Jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat (21/02/2025).**



## Pengawasan DPR untuk memastikan Pertamina bertanggungjawab dan memberikan penjelasan kepada Masyarakat atas ditemukannya BBM Oplosan atau Pertamax Blending

### Metode Blending BBM



### Proses Blending Produk BBM Pertamina



Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Cibubur, Jakarta Timur. Sidak ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, yang bertujuan untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dijual di pasaran, khususnya terkait dengan RON 92 dan RON 90.

Sumber: RDP Komisi XII 26 feb 2025 Bersama PT Pertamina Patra Niaga & Perusahaan Minyak Swasta, KATADATA

# Tinjau Program 3 Juta Rumah di NTB

**K**omisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mengawasi pelaksanaan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu arahan utama Presiden Prabowo Subianto. Perlu diketahui, agenda ini merupakan langkah awal dalam memastikan program perumahan nasional dapat berjalan sesuai harapan, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sebab itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan bahwa pencapaian target pembangunan rumah dalam skala besar ini membutuhkan strategi inovatif, terutama dalam pembiayaan. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Rancangan APBN 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp18,775 miliar untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang hanya cukup untuk membangun sekitar 220.000 unit rumah. Jumlah ini jauh dari target yang ditetapkan.

“Jika melihat realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) selama 10 tahun terakhir yang hanya mencapai 1,55 juta unit dari target 2,56 juta, kita harus realistis. Untuk mencapai 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan inovasi dalam pendanaan, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” ujar Ridwan Bae saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kecamatan Labuapi,



FOTO: TS/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, bersama tim saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (21/2).

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023, pembangunan 3 juta rumah membutuhkan setidaknya 18.000 hektare lahan. Dengan keterbatasan anggaran dan tantangan teknis yang ada, mewakili Komisi V DPR RI, ia berkomitmen untuk terus mengawal dan memastikan program ini berjalan dengan baik serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Komisi V DPR RI akan terus mengawasi dan mendorong solusi konkret agar program ini tidak hanya menjadi sekadar target angka, tetapi benar-benar terealisasi secara berkualitas dan tepat sasaran,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

**um/aha**

**Jika melihat realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) selama 10 tahun terakhir yang hanya mencapai 1,55 juta unit dari target 2,56 juta, kita harus realistis.**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Bertemu DPRD Solok Selatan, Bahas Pembangunan Infrastruktur

**A**nggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda melakukan pertemuan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk membahas sinkronisasi program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, pembahasan soal efisiensi anggaran juga menjadi topik pembicaraan antara keduanya.

“Yang terpenting itu koordinasi antara DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan DPR RI pada hari ini. Yang menjadi banyak aspirasi terkait kebutuhan pembangunan yang ada di Kabupaten Solok Selatan,”

kata Zigo kepada **Parlementaria**, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

Beberapa infrastruktur yang menjadi perhatian adalah jalan akses menuju Kabupaten Solok Selatan. Zigo menyoroti Jalan Air Dingin yang merupakan jalan nasional yang sudah lama tidak diperbaiki dan mengalami kerusakan parah. Adanya kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan perbaikan jalan Air Dingin sepanjang 14 km sempat terhenti, meski sebelumnya telah dianggarkan. Namun, proyek ini kembali masuk ke

dalam perencanaan setelah adanya realokasi anggaran.

Selain itu, jalan tembus Solok Selatan ke Dharmasraya yang menghubungkan ke jalan lintas Sumatera juga menjadi perhatian. Jalan ini merupakan akses logistik penting dan telah dianggarkan melalui Inpres. “*Insya Allah* itu yang diminta lagi oleh kawan-kawan bagaimana akses, konektivitas menuju Kabupaten Solok Selatan ini, agar ini diperjuangkan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor apapun di Kabupaten Solok Selatan,” tandas Zigo. — **nov,bia/aha**



FOTO: MAN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda, dalam foto bersama usai pertemuan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya

# Perlu Mitigasi Cegah Kebakaran *Smelter* Gresik



FOTO: NDN/AHA

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, saat meninjau *Smelter* milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/02/2025).

**S** *melter single line* milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik terbakar pada 14 Oktober 2024 yang lalu. Kebakaran itu terjadi hanya berselang satu bulan setelah *smelter* tersebut di diresmikan pada 23 September 2024.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo meminta PT Freeport Indonesia menyiapkan mitigasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. “Kalau bicara internasional semuanya harus *safety*. Jangan ada kebakaran, *smelter* ini terbesar *loh single line* terbesar di dunia,” ujarnya, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur,

Kamis (20/02).

Peristiwa itu pun kata Eko menimbulkan berbagai efek domino dan memberikan kerugian bagi negara. Diketahui, perbaikan usai insiden tersebut menelan biaya sampai 100 juta USD. Padahal *smelter* PT Freeport di Gresik ini diharapkan bisa menjadi tumpuan Indonesia dalam program hilirisasi.

“Pasca kebakaran kurang lebih delapan bulan. Ini *kan* banyak *supply* dan *demand*-nya yang jadinya harus kita kondisikan. Ini kemudian menyikapinya harus seperti apa,” katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto. Karena kerugian yang diderita, PT Freeport

Indonesia kemudian memohon agar diperbolehkan kembali melakukan ekspor. Hal ini menurutnya sangat bertolak belakang dengan semangat hilirisasi yang diinginkan pemerintah.

Namun demikian, Legislator Partai Golkar itu kemudian berkata bahwa permintaan dari PT Freeport Indonesia agar bisa melakukan ekspor kembali mungkin saja dipertimbangkan oleh pemerintah.

“Ekspor sudah melanggar dari Undang-Undang Minerba yang tidak menjual bahan mentah. Namun demikian, tentunya pemerintah akan menegosiasi apakah dampak-dampak itu dalam batas toleransi dan bisa diberikan ekspor kembali,” pungkasnya. **ndn/aha**



# Garuda Indonesia Harus Pertimbangkan Aspek Keadilan Saat Perekrutan

**K**ebijakan rekrutmen pramugari PT Garuda Indonesia kembali menjadi sorotan. Hal itu usai maskapai nasional ini memilih untuk merekrut lulusan *fresh graduate* dibandingkan para

yang lebih mengutamakan *fresh graduate* dibandingkan tenaga kerja berpengalaman.

“Kami meminta PT Garuda Indonesia untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait alasan kebijakan ini.

kesejahteraan tenaga kerja dalam kebijakan yang diambil oleh perusahaan pelat merah tersebut. Ia pun meminta Garuda Indonesia agar tidak hanya fokus pada regenerasi tenaga kerja, akan tetapi juga memberikan peluang kepada mantan karyawan yang memiliki pengalaman di industri penerbangan.

“Perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja yang terdampak. Jangan sampai kebijakan ini mengabaikan hak-hak para pekerja yang telah lama mengabdikan,” tandas Politisi Fraksi PAN itu.

— **um/rdn**

**Kami meminta PT Garuda Indonesia untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait alasan kebijakan ini. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kerja yang telah berkontribusi bertahun-tahun.**

tenaga kerja berpengalaman yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan akibat pandemi.

Sekitar 200 mantan pramugari ini mengungkapkan keberatan mereka terhadap keputusan perusahaan yang tidak memberi kesempatan bagi tenaga kerja berpengalaman untuk kembali bekerja, meskipun masih memiliki lisensi dan keterampilan yang relevan.

Mengetahui isu tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mendesak Garuda Indonesia untuk meninjau ulang kebijakan rekrutmen pramugari

Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kerja yang telah berkontribusi bertahun-tahun,” ujar Eko, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Mewakili Komisi VI DPR RI, Eko menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek

**Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan para Mantan Pramugari Garuda Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta. Selasa (18/2/2025)**



FOTO: FHN/PDT



# Revisi UU Kepariwisataan Dorong Regulasi yang Adaptif dan Berdaya Saing

**K**omisi VII DPR RI terus menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam upaya memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata nasional, Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, asosiasi, serta pelaku industri pariwisata.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan pembaruan regulasi di sektor pariwisata sangat penting agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan pola perjalanan wisatawan, digitalisasi industri, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan.

“Kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang luas agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memperkuat daya saing industri pariwisata, tetapi juga memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan,” ujar Chusnunia di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Ia menambahkan, revisi undang-undang ini diharapkan dapat

memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku usaha, meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia, serta memperkuat peran industri pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam RDPU ini, beberapa isu utama yang dibahas mencakup

**Kami berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang luas agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya memperkuat daya saing industri pariwisata, tetapi juga memastikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.**

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar, asosiasi, serta pelaku industri pariwisata, Senin (17/2/2025).

kebijakan investasi di sektor pariwisata, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis wisata, perlindungan tenaga kerja di industri pariwisata, serta strategi pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.

Sebagai bagian dari keterbukaan dalam proses legislasi, Komisi VII DPR RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan masukan terhadap revisi UU Kepariwisataan ini. Hal ini diharapkan dapat menciptakan regulasi yang lebih inklusif, responsif, dan berdaya saing, guna menjawab tantangan serta peluang di sektor pariwisata nasional ke depan. — **ssb/aha**



# Revisi UU Haji Ciptakan Regulasi yang Lebih Adaptif dan Adil



FOTO: AFR/PDT

Komisi VIII DPR RI saat menggelar RDPU dengan Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Para Ketua Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

**K**omisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Para Ketua Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/2). Agenda utama dalam rapat ini adalah membahas kebijakan peningkatan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi jamaah haji khusus dan umrah dalam draf revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti pentingnya revisi regulasi untuk

menyesuaikan dengan dinamika terbaru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi kuota haji khusus yang selama ini belum terserap maksimal.

“Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sanksi bagi BPI-BHK (Badan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) yang tidak mengisi kuota tersebut,” ujar Hidayat.

Selain itu, Hidayat juga menyoroti perlunya pemisahan tugas antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan badan khusus yang menangani haji dan umrah. Menurutnya, pemisahan ini dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan haji dan umrah serta memfokuskan tugas Kemenag pada urusan

keagamaan secara lebih luas.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai kemungkinan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk menggunakan kuota haji negara tempat mereka tinggal. Terkait dengan umrah, Hidayat menegaskan pentingnya kajian komprehensif mengenai umrah mandiri.

Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diharapkan dapat menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk optimalisasi kuota, peningkatan perlindungan bagi jamaah, serta penyesuaian regulasi dengan perkembangan zaman.

**ssb/aha**



# PR Mendikti Saintek yang Baru: Tukin, Beasiswa, dan BOPTN

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memberikan catatan penting bagi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang baru dilantik. Menurutnya, ada beberapa pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan, di antaranya terkait Tunjangan Kinerja (Tukin), pemerataan beasiswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

“Banyak PR yang harus segera diselesaikan oleh Mendikti Saintek yang baru. *Pertama*, soal Tukin. Dalam rapat kerja terakhir, anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk Tukin belum dimasukkan. Kami di Komisi X DPR RI masih terus memperjuangkan agar anggaran ini masuk dalam APBN 2025,” ujar Lalu Hadrian di UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (20/2).

Ia menegaskan bahwa aturan pencairan Tukin harus segera diterbitkan agar dapat tersalurkan kepada para penerima. “Jika instruksi presiden (Inpres) sudah keluar, segera keluarkan Peraturan Menteri Dikti Saintek (Permen Dikti



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat memimpin kunjungan kerja di UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (20/02/2025).

Saintek), lalu terbitkan pedoman pencairannya. Tukin ini adalah tunjangan kinerja yang berbasis capaian dosen, dan pedomannya harus jelas agar bisa segera dibayarkan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pemerataan beasiswa bagi mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya,

tidak semua PTS memiliki kondisi keuangan yang mandiri, sehingga masih ada yang membutuhkan dukungan pemerintah melalui program beasiswa.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian menyoroti BOPTN, yang dinilai harus dikelola dengan tepat agar tidak berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa usulan pemotongan BOPTN tidak boleh mencapai 50%, melainkan cukup di bawah 5% agar tidak membebani operasional perguruan tinggi.

Untuk itu, Komisi X berkomitmen mengawal kebijakan di sektor pendidikan tinggi agar tetap berpihak kepada mahasiswa dan tenaga pendidik. **skr/aha**

**Banyak PR yang harus segera diselesaikan oleh Mendikti Saintek yang baru. *Pertama*, soal Tukin. Dalam rapat kerja terakhir, anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk Tukin belum dimasukkan. Kami di Komisi X DPR RI masih terus memperjuangkan agar anggaran ini masuk dalam APBN 2025,**



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Kesejahteraan Pendidik Tentukan Kualitas Pendidikan



Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, saat kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

**B**eberapa waktu yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai tunjangan kinerja (tukin) dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama (Kemdikristek) yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024.

Menanggapi aksi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati, menegaskan pentingnya kesejahteraan dosen untuk menunjang kualitas pendidikan di Indonesia.

“Bagaimana kita ingin memintarkan anak orang lain, sementara anak kita sendiri di rumah *keleleran*,” ujar Dewi Coryati usai kunjungan kerja spesifik ke Universitas Airlangga, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/2).

Politisi Fraksi PAN ini juga menekankan bahwa tunjangan kinerja adalah hak para dosen yang harus dipenuhi oleh pemerintah. “Selanjutnya, kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita,” tambahnya.

Anggota Komisi X lainnya, Sofyan Tan, turut memberikan tanggapannya. Ia menyoroti rendahnya gaji dosen di Indonesia

dibandingkan dengan pekerja di sektor lain.

Menurutnya, tunjangan kinerja merupakan hak yang sah bagi dosen dan telah diatur dalam undang-undang. Tukin itu adalah salah satu *reward* yang diberikan kepada dosen yang memiliki kinerja baik. Karena kalau dosen memiliki kinerja yang baik, dampak positifnya adalah peningkatan prestasi mahasiswa,” jelasnya.

Ia meyakini peningkatan kesejahteraan dosen akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. **we/aha**



# Kontradiksi Besarnya APBD dengan Tingginya Angka Kemiskinan

**A**nggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menyoroti fenomena ketimpangan ekonomi di beberapa daerah di Sumatera Selatan yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar, namun tingkat kemiskinannya masih tinggi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI di Palembang, Jumat (21/2).

“Kami mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional maupun rata-rata pertumbuhan di Pulau Sumatera. Namun, yang perlu dicermati adalah kualitas dari

pertumbuhan tersebut,” ujar Bertu Merlas.

Menurutnya, ada beberapa daerah di Sumatera Selatan yang memperoleh dana bagi hasil cukup besar dari sektor pertambangan, tetapi belum diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa sektor agroekonomi justru memiliki dampak yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dibandingkan sektor pertambangan.

“Kita butuh Bank Indonesia untuk aktif berdiskusi dengan pemerintah daerah agar dana bagi hasil dan APBD yang besar itu benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengingatkan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat. Ia berharap Bank Indonesia dapat memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah agar pengelolaan APBD lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam kunjungan spesifik ini, Komisi XI DPR RI bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan membahas berbagai strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Idulfitri. ➡ **aha**



Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas (kiri), saat bertukar cenderamata usai pertemuan kunjungan spesifik Komisi XI DPR RI di Palembang, Jumat (21/2/2025).

# Indonesia Kuasai 54 Persen Saham PT Vale

**D**alam rangka mendalami lebih jauh tentang praktik pertambangan yang berkelanjutan, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengunjungi PT Vale Indonesia yang terletak di Desa Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Sugeng menyampaikan bahwa PT Vale kini menjadi salah satu pemain utama dalam industri pertambangan Indonesia, khususnya dalam produksi nikel.

Sugeng menjelaskan bahwa setelah divestasi yang terjadi pada tahun lalu, kepemilikan saham Indonesia di PT Vale Indonesia mencapai sekitar 54 persen, dengan 30 persen saham dimiliki oleh MIND ID dan 20 persen saham diperdagangkan di pasar publik. Menurutnya, divestasi ini menunjukkan bahwa saat ini, PT

Vale sebagian besar dimiliki oleh Indonesia, yang memungkinkan kontrol lebih besar terhadap industri ini.

Sugeng menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara manusia dan alam dalam dunia pertambangan. “Pertambangan memegang peran yang sangat penting dalam peradaban manusia, namun, tanpa memperhatikan

**Pertambangan memegang peran yang sangat penting dalam peradaban manusia, namun, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian alam, pertambangan tidak bisa dikatakan manusiawi.**

keberlanjutan dan kelestarian alam, pertambangan tidak bisa dikatakan manusiawi,” ujarnya kepada **Parlementaria**, Minggu (16/7).

Selama kunjungan tersebut, Sugeng dan Tim Komisi XII mempelajari lebih lanjut mengenai peran PT Vale dalam mendukung perkembangan industri energi terbarukan, khususnya dalam produksi nikel *matte*, bahan baku utama untuk baterai penyimpanan energi.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa nikel adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting diketahui memberikan kontribusi sekitar 500 miliar rupiah setiap tahunnya dari skema bagi hasil, yang berkontribusi hampir sepertiga dari total APBD daerah yang mencapai 1,5 triliun rupiah.

**afr/rdn**



Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto foto bersama usai mengunjungi PT Vale Indonesia yang terletak di Desa Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu (16/7/2025).

Scan QR untuk berita selengkapnya





Komisi XII DPR RI dalam inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PT Sodikun dan sub-pangkalan di Jakarta Barat, Senin (10/2/2025). FOTO: JKA/PDT



# DARI RUANG SIDANG

**TVR**  
PARLEMEN



@TVR.PARLEMEN



TVR PARLEMEN



TVR PARLEMEN



TVR PARLEMEN

WWW.TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID

Sampaikan aspirasi Anda melalui  
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri



@dpr\_ri



9 772614 339005